



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN SIMANJUNTAK
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 732512

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 985.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/120 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 586 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 547.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOTOR, HONDA D1BO2N12L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA ADV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 40.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 55.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.627.000.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.627.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.